



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **401261**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 13.320.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/361 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 8.300.000.000
2. Tanah Seluas 5341 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000
4. Tanah Seluas 1353 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.615.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, LEXUS NX300 F-SPORT 4X2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VOXY 2.0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.846.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 16.500.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.127.500.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 35.408.500.000**

III. HUTANG **Rp. ---**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

35.408.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.